

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2026, Kota Surakarta mengalami **deflasi sebesar 0,38 % (mtm)** dengan inflasi tahun kalender tercatat sebesar -0,38% (ytd) dan inflasi tahunan sebesar 2,76% (yoy). Tingkat deflasi Kota Surakarta, baik secara bulanan maupun tahunan, lebih dalam dibandingkan dengan tingkat deflasi Nasional dan Jawa Tengah.
2. Pada bulan Februari 2026, Kota Surakarta mengalami **inflasi sebesar 0,90% (mtm)** dengan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,52% (ytd) dan inflasi tahunan sebesar 4,45% (yoy). Tingkat inflasi tahunan Kota Surakarta lebih rendah dibanding tingkat inflasi Nasional, namun tingkat inflasi bulanan Kota Surakarta lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional maupun Jawa Tengah.
3. Pada bulan Maret 2026, Kota Surakarta mengalami **inflasi sebesar 0,48% (mtm)** dengan inflasi tahun kalender sebesar 1,00% (ytd) dan inflasi tahunan sebesar 3,59% (yoy). Tingkat inflasi bulanan Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi Jawa Tengah, namun tingkat inflasi tahunan Kota Surakarta lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional maupun Jawa Tengah.

TPID Kota Surakarta terus berkomitmen untuk menjaga distribusi pasokan dan stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat dan diharapkan dapat menjaga capaian inflasi yang rendah dan stabil sesuai target sasaran inflasi Nasional.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2026, deflasi utamanya didorong oleh sbb:

Deflasi pada bulan Januari terutama didorong oleh penurunan tingkat harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil -0,53%, dan Kelompok Transportasi dengan andil -0,06%. Penurunan harga pada kelompok tersebut utamanya disebabkan oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras.

- a. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 2,16%. Deflasi kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh penurunan sejumlah komoditas, antara lain cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras. Penurunan harga tersebut didorong oleh kembali normalnya permintaan masyarakat pasca periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Selain itu, kondisi pasokan yang relatif terjaga turut membantu menekan harga sehingga mendorong deflasi pada kelompok ini.
- b. Kelompok Transportasi tercatat mengalami deflasi sebesar 0,49%. Deflasi pada kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh penurunan harga bensin, tarif kereta api, dan tarif angkutan antar kota. Penurunan harga bensin menjadi faktor dominan pendorong deflasi pada kelompok ini sejalan dengan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina, yang berlaku pada 1 Januari 2026. Penyesuaian ini meliputi BBM jenis Pertamina, Pertamina Green, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Selain

itu, penurunan tarif kereta api dan tarif angkutan antar kota yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan pasca periode HBKN Natal dan Tahun Baru turut berkontribusi terhadap deflasi pada kelompok ini.

Sebaliknya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat mengalami inflasi sebesar 2,37% dengan komoditas yang memberikan andil terbesar adalah emas perhiasan. Komoditas emas perhiasan kembali memberikan andil terhadap inflasi sejalan dengan kenaikan harga emas dunia. Pada Januari 2026, harga emas tercatat mencapai level tertinggi (all-time-high) sebesar Rp3.168.000 per gram. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya volatilitas pasar.

2. Pada bulan Februari 2026, inflasi utamanya didorong sbb:

Inflasi pada bulan Februari utamanya didorong oleh kenaikan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,55% dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,26%. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulan Februari 2026 antara lain emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah.

- a. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 2,31% dengan komoditas yang memberikan andil terbesar adalah cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Kenaikan harga pada komoditas cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kondisi cuaca ekstrem di wilayah Jawa. Komoditas cabai rawit mencapai harga tertinggi sebesar Rp100.000 pada akhir minggu ke 3, sebelum mengalami koreksi sampai Rp65.000 pada akhir Februari 2026. Selain itu, dari sisi penawaran, tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan pada periode HBKN Ramadhan, khususnya untuk komoditas pangan bergejolak (volatile food). Di samping itu, peningkatan aktivitas SPPG turut mendorong permintaan terhadap komoditas pangan.
- b. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 3,74%, dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah emas perhiasan. Emas perhiasan kembali memberikan andil terhadap inflasi di Kota Surakarta, sejalan dengan kenaikan harga emas dunia. Meskipun harga emas dunia sempat mencapai level tertinggi pada Januari 2026, pada Februari 2026 harga emas masih menunjukkan volatilitas yang tinggi.

3. Pada bulan Maret 2026, inflasi utamanya didorong oleh sbb:

Inflasi pada bulan Maret 2026 utamanya didorong oleh kenaikan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,29% dan Kelompok Transportasi dengan andil 0,11%.

- a. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 1,20% dengan komoditas yang memberikan andil terbesar adalah daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan beras. Kenaikan pada kelompok ini terutama didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat selama periode HBKN Idul Fitri. Peningkatan permintaan tersebut utamanya pada komoditas beras, daging ayam ras, dan telur ayam

ras.

- b. Kelompok Transportasi mengalami inflasi sebesar 0,89%, dengan komoditas yang memberikan andil terbesar adalah bensin, tarif angkutan antar kota, dan pemeliharaan/service. Inflasi komoditas bensin dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga BBM Non-Subsidi pada 1 Maret 2026. Penyesuaian tersebut mencakup BBM jenis Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Selain itu, tekanan inflasi pada kelompok ini juga didorong oleh peningkatan demand terhadap transportasi selama periode HBKN Idul Fitri. Peningkatan mobilitas masyarakat, mendorong kenaikan tarif angkutan serta jasa pemeliharaan/servis kendaraan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti **Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi** bersama Kementerian Dalam Negeri secara rutin setiap minggu melalui daring. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta.
2. Melakukan **Pemantauan dan Pembaruan Data Harga Komoditas** di Pasar Legi, Pasar Gede, dan Pasar Nusukan melalui aplikasi SiHati dan SP2KP. Ketiga pasar tersebut merupakan pasar pantauan BPS yang menjadi acuan dalam perhitungan tingkat inflasi. Pemantauan harga dilaksanakan secara harian guna memastikan data yang actual dan akurat, sehingga memungkinkan langkah intervensi yang cepat dan tepat terhadap lonjakan harga yang signifikan pada komoditas tertentu.
3. Mendorong penguatan komunikasi dan sinergi melalui pelaksanaan **High Level Meeting (HLM) TPID Kota Surakarta** yang dipimpin oleh Wali Kota Surakarta, Kepala Bank Indonesia Solo, dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta. Fokus kegiatan ini pada pembahasan strategi pengendalian harga, khususnya dalam menghadapi periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
4. Melaksanakan **Rapat Koordinasi bersama PT Pertamina, BULOG, dan Perumda PAU Pedaringan** dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting sepanjang tahun 2026 melalui penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antisipasi risiko gejolak harga.
5. Melaksanakan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** sebanyak 6 kali di 5 Kecamatan di Kota Surakarta sebagai upaya pengendalian harga komoditas pangan serta sebagai menjaga daya beli masyarakat. GPM dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Surakarta bekerja sama dengan BULOG, Perumda PAU Pedaringan, ID Food, Poklhasar, dan Kelompok Tani di bawah binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.
6. Melaksanakan **Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok dan Penting, BBM, serta LPG** subsidi 3 kg tingkat agen, dan distributor untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga.
7. Melaksanakan **Monitoring Bahan Pokok** di Pasar Tradisional guna memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan komoditas, khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kegiatan ini dilaksanakan bersama Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Surakarta. Monitoring ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi gangguan pasokan dan memastikan stabilitas harga.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Selama triwulan I, Kota Surakarta tercatat mengalami inflasi tertinggi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh karakteristik Kota Surakarta sebagai daerah non-produsen komoditas pangan sehingga sangat bergantung pada pasokan dari daerah di sekitarnya. Ketergantungan ini menyebabkan Kota Surakarta rentan terhadap gangguan distribusi, serta fluktuasi produksi di daerah sentra.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan komunikasi dengan daerah penghasil serta mendorong kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas ke Kota Surakarta. KAD ini dapat dioptimalkan melalui peran BUMD Perumda PAU Pedaringan dengan skema business to business (B2B). Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mempersingkat rantai distribusi sehingga dapat menekan biaya dan menjaga harga di tingkat konsumen.
2. Mendorong penguatan komunikasi dengan distributor dalam rangka pengendalian harga dan menjaga ketersediaan komoditas. Komunikasi ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait kondisi pasokan dan perkembangan harga di tingkat distributor sekaligus sebagai media untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses distribusi. Dengan adanya identifikasi atas kondisi tersebut, TPID Kota Surakarta dapat merumuskan Langkah intervensi yang tepat untuk memastikan kelancaran distribusi bapokting sehingga stabilitas harga tetap terjaga.